



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SIMON SAPARY**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **631220**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.060.000.000

1. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KEEROM, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAYAPURA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1800 m2/1200 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 429.700.000

1. MOBIL, GRAND VITARA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA KLX TRAIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000



4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
4.700.000		
5. MOTOR, YAMAHA SPM R2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
45.000.000		
6. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
225.000.000		
7. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.494.800.000
III. HUTANG	Rp.	234.884.801
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.259.915.199

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.